

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memiliki peran penting dalam perekonomian lokal karena menyerap tenaga kerja dan menggerakkan aktivitas produksi dan perdagangan. Peran strategis UMKM dalam perekonomian UMKM memegang peran vital dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah mencapai sekitar 64 juta unit UMKM (Febriansyah et al., 2024). Kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja dan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional sangat signifikan, sehingga peningkatan jumlah UMKM diproyeksikan akan semakin meningkat PDB Indonesia di masa mendatang (Febriansyah et al., 2024). Meskipun demikian, UMKM masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam pengelolaan bisnis, termasuk keterbatasan akses permodalan, akses pasar, dan pemanfaatan teknologi informasi yang memadai (Febriansyah et al., 2024).

Salah satu tantangan utama yang masih dihadapi UMKM adalah pengelolaan kas yang belum dilakukan secara optimal. Menurut Hasyim dalam (Rajagukguk, 2024), sekitar 77,5% UMKM di Indonesia belum memiliki laporan keuangan, sehingga pengambilan keputusan usaha, termasuk pengelolaan kas, masih dilakukan secara sederhana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum

menerapkan pencatatan arus kas yang sistematis, belum mampu memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi, serta belum melakukan perencanaan maupun pengendalian kas secara memadai. Akibatnya, pelaku UMKM sering mengalami kesulitan dalam memantau kondisi keuangan usahanya, memenuhi kebutuhan modal kerja, dan mengambil keputusan keuangan yang tepat. Permasalahan ini diduga berkaitan dengan rendahnya tingkat literasi keuangan serta belum optimalnya pemanfaatan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, peningkatan literasi keuangan dan inklusi keuangan menjadi faktor penting dalam mendorong perilaku pengelolaan kas yang lebih baik sehingga keberlangsungan dan perkembangan usaha UMKM dapat terjaga (Febriansyah et al., 2024).

Literasi keuangan secara umum didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan untuk mengelola sumber daya finansial secara efektif, sehingga individu atau pelaku usaha mampu mengambil keputusan yang bijak terkait anggaran, tabungan, investasi, dan penggunaan kredit (Nogueira et al., 2025). Bagi UMKM, literasi keuangan berperan penting dalam praktik pengelolaan usaha sehari-hari, seperti pencatatan transaksi, pengelolaan arus kas, perencanaan keuangan, hingga evaluasi keputusan investasi. Rendahnya literasi keuangan sering kali menyebabkan pelaku UMKM mengabaikan praktik manajemen keuangan yang sehat, misalnya tidak melakukan pencatatan secara memadai atau tidak memisahkan keuangan pribadi dan usaha, sehingga usaha menjadi kurang efisien dan lebih rentan mengalami kegagalan (Febriansyah et al., 2024). Sebaliknya,

tingkat literasi keuangan yang lebih baik terbukti berkorelasi positif dengan perilaku keuangan yang lebih rasional dan disiplin, termasuk dalam penyusunan anggaran dan pengambilan keputusan finansial (Prasetyo et al., 2023).

Di Indonesia, tingkat literasi keuangan masyarakat masih relatif rendah walaupun mengalami peningkatan. Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 49,68% pada tahun 2022, meningkat dari 38,03% pada tahun 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Angka tersebut mengindikasikan bahwa kurang dari separuh masyarakat memiliki pemahaman yang memadai terhadap produk dan layanan keuangan, termasuk di kalangan pelaku UMKM. Kondisi ini memperkuat temuan berbagai studi bahwa peningkatan literasi keuangan dapat memberdayakan UMKM melalui perbaikan kemampuan pengelolaan keuangan dan kualitas pengambilan keputusan, sehingga risiko kegagalan usaha dapat ditekan dan kinerja bisnis meningkat (Nogueira et al., 2025).

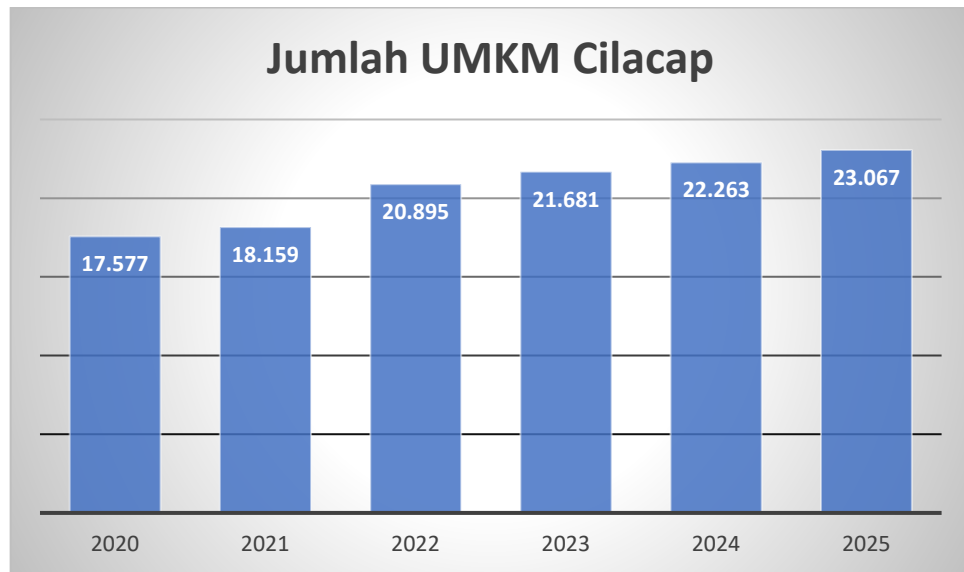
Selain literasi, inklusi keuangan juga menjadi pilar penting dalam pemberdayaan UMKM. Inklusi keuangan merujuk pada terjaminnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas sesuai kebutuhan dan kemampuan (Febriansyah et al., 2024). Keterbatasan akses terhadap permodalan dan layanan keuangan telah lama diidentifikasi sebagai hambatan utama perkembangan UMKM di Indonesia (Febriansyah et al., 2024). Karena itu, berbagai kebijakan pemerintah didorong untuk meningkatkan inklusi keuangan, antara lain melalui Strategi Nasional

Keuangan Inklusif (SNKI) serta program digitalisasi keuangan UMKM (Febriansyah et al., 2024). Dampaknya, indeks inklusi keuangan nasional mencapai 85,10% pada tahun 2022, meningkat dari 76,19% pada tahun 2019 (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Peningkatan inklusi keuangan dinilai dapat memberi dampak positif bagi kinerja UMKM, misalnya melalui kemudahan transaksi, peningkatan peluang memperoleh modal, serta efisiensi pengelolaan operasional usaha (Febriansyah et al., 2024).

Meskipun demikian, permasalahan muncul ketika peningkatan inklusi tidak diikuti oleh peningkatan literasi yang sepadan. Survei OJK tahun 2022 menunjukkan adanya kesenjangan antara indeks inklusi keuangan yang tinggi (85,10%) dan indeks literasi keuangan yang masih rendah (49,68%) (Otoritas Jasa Keuangan, 2022). Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa sebagian pelaku usaha mungkin telah memiliki akses layanan keuangan formal, tetapi belum memiliki kemampuan untuk memanfaatkannya secara optimal dalam pengelolaan usaha. Bahkan, Bank Indonesia mencatat sekitar 60–70% UMKM belum memperoleh akses pembiayaan perbankan, salah satunya karena rendahnya literasi keuangan pemilik UMKM (Hirawati & Giovanni, 2021). Kondisi ini terlihat dalam praktik di lapangan, ketika banyak pelaku UMKM masih melakukan pencatatan keuangan yang sangat sederhana atau tidak melakukan pencatatan sama sekali, serta belum memisahkan keuangan usaha dan pribadi. Akibatnya, pengelolaan kas menjadi kurang tertib dan UMKM

rentan mengalami kekurangan kas, sekaligus kesulitan memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh pembiayaan formal.

Kondisi tersebut juga tampak di berbagai daerah, salah satunya Kabupaten Cilacap. Kabupaten Cilacap memiliki basis UMKM yang besar dan terus berkembang, dengan jumlah sekitar 17.577 pelaku UMKM pada tahun 2020, meningkat jadi 18.159 unit pelaku UMKM pada tahun 2021, lalu melonjak 20.895 pelaku UMKM pada tahun 2022, tahun 2023 sekitar 21.681 unit UMKM, tahun 2024 kembali naik sekitar 22.263 unit, dan mencapai 23.067 unit hingga Juli 2025 (Septianto, 2025). Nah data yang bersumber langsung dari DPUKM (Dinas Pemberdayaan UMKM dan Koperasi) khususnya Cilacap Utara pada tahun 2025 mencapai 1.241 pelaku UMKM. Pemerintah daerah merespons pertumbuhan ini melalui program pendampingan, pelatihan manajemen keuangan, serta upaya kemudahan akses permodalan bagi pelaku UMKM (Septianto, 2025). Namun, meskipun terdapat berbagai program tersebut, persoalan mendasar terkait perilaku pengelolaan kas masih dijumpai, terutama pada UMKM mikro dan kecil, seperti minimnya pencatatan arus kas, belum adanya pemisahan keuangan usaha dan pribadi, serta tingginya kerentanan terhadap ketidakseimbangan kas. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap perilaku pengelolaan kas UMKM.



Gambar 1.1 Pertumbuhan UMKM Cilacap

Sumber: Radar Banyumas yang ditulis oleh Septrianto (2025)

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan memiliki peran penting terhadap kinerja dan pengelolaan usaha UMKM. (Khusna & Setiawan, 2025) menemukan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis UMKM di Kota Kediri; pemilik UMKM dengan literasi yang lebih baik cenderung lebih sistematis dalam mengelola keuangan, menyusun rencana keuangan, serta mengakses pendanaan secara efektif. Penelitian yang sama juga menunjukkan bahwa inklusi keuangan berdampak positif terhadap kinerja UMKM melalui peningkatan akses terhadap tabungan, pinjaman, serta transaksi digital yang mendukung pengelolaan arus kas dan perluasan pasar (Khusna & Setiawan, 2025).

Temuan serupa juga ditunjukkan oleh (Sarfiah et al., 2025). pada UMKM di Desa Bira, Kabupaten Bulukumba. Hasil analisis regresi

menunjukkan bahwa literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja UMKM. Pelaku UMKM dengan literasi yang lebih baik cenderung mampu mengelola modal usaha, merencanakan keuangan, serta mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Sementara itu, akses terhadap layanan keuangan formal seperti rekening tabungan, pinjaman resmi, dan transaksi non-tunai mempermudah operasional usaha dan mendukung pengembangan bisnis (Sarfiah & Alamsjah, 2025).

Pada konteks internasional, (Toni et al., 2024) menegaskan bahwa literasi dan inklusi keuangan tidak hanya berdampak pada aspek finansial internal, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kinerja operasional dan keberlanjutan rantai pasok UMKM. UMKM dengan literasi dan akses keuangan yang lebih baik dinilai mampu mengelola rantai pasokan secara lebih efisien, menekan biaya operasional, serta meningkatkan kapasitas memenuhi permintaan pasar secara berkelanjutan (Toni et al., 2024). Dengan demikian, literasi dan inklusi keuangan merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam memperkuat daya tahan dan keberlanjutan UMKM.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji bagaimana literasi keuangan dan inklusi keuangan memengaruhi perilaku pengelolaan kas UMKM, khususnya pada konteks Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur terkait pengelolaan keuangan UMKM, sekaligus menjadi masukan praktis bagi pemerintah

daerah dan pemangku kepentingan dalam merancang program peningkatan kapasitas keuangan UMKM secara lebih tepat sasaran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan kas UMKM di Cilacap Utara?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengelolaan kas UMKM di Cilacap Utara?
3. Apakah literasi keuangan dan inklusi keuangan berpengaruh simultan terhadap perilaku pengelolaan kas UMKM di Cilacap Utara?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini, sebagai berikut:.

1. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan terhadap perilaku pengelolaan kas UMKM di Cilacap Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap perilaku pengelolaan kas UMKM di Cilacap Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap perilaku pengelolaan kas UMKM di Cilacap Utara.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini ditetapkan untuk membatasi pembahasan agar tetap terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada UMKM dengan unit analisis pemilik atau pengelola usaha sebagai pihak yang menjalankan keputusan dan praktik pengelolaan keuangan usaha. Lokasi penelitian dibatasi pada UMKM yang berada di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cilacap Utara, mengingat wilayah ini memiliki jumlah UMKM yang terus bertumbuh serta telah didukung berbagai program pendampingan dan pelatihan manajemen keuangan, namun dalam praktiknya masih dijumpai permasalahan pengelolaan kas seperti minimnya pencatatan transaksi, belum adanya pemisahan keuangan pribadi dan usaha, serta kerentanan terhadap kekurangan kas.

Variabel yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada tiga variabel utama, yaitu literasi keuangan sebagai variabel independen pertama, inklusi keuangan sebagai variabel independen kedua, dan perilaku pengelolaan kas sebagai variabel dependen. Literasi keuangan dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan pelaku UMKM dalam memahami dan menerapkan pengetahuan dasar keuangan usaha, termasuk pengelolaan arus kas, kebiasaan menabung, penggunaan kredit atau pembiayaan, serta perencanaan keuangan. Inklusi keuangan dibatasi pada akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal oleh pelaku UMKM, seperti kepemilikan rekening, penggunaan produk perbankan atau pembiayaan, serta pemanfaatan layanan transaksi non-tunai atau keuangan digital yang

menunjang aktivitas usaha. Sementara itu, perilaku pengelolaan kas dibatasi pada praktik pengelolaan kas yang dilakukan pelaku UMKM dalam operasional usaha sehari-hari, meliputi pencatatan pemasukan dan pengeluaran, pemisahan uang pribadi dan usaha, penyusunan anggaran kas, pemantauan serta pengendalian saldo kas, dan perencanaan kebutuhan kas jangka pendek.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini disusun untuk menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemberdayaan UMKM. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dan literatur di bidang manajemen keuangan, khususnya terkait perilaku pengelolaan kas pada UMKM. Dengan menguji pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap perilaku pengelolaan kas, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penguatan konsep bahwa kemampuan pengetahuan keuangan dan keterjangkauan layanan keuangan formal merupakan faktor penting dalam membentuk praktik pengelolaan kas yang lebih tertib dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa, terutama pada konteks UMKM daerah, sehingga dapat membuka peluang pengembangan model penelitian, penambahan variabel, maupun perbandingan antar wilayah.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pelaku UMKM sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran dalam meningkatkan pengelolaan kas usaha. Hasil penelitian dapat membantu pelaku UMKM memahami pentingnya pencatatan transaksi, pemisahan keuangan pribadi dan usaha, penyusunan anggaran kas, serta pemantauan arus kas sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas usaha dan mengurangi risiko kekurangan kas. Bagi pemerintah daerah Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap penelitian ini diharapkan menjadi masukan dalam merancang program pendampingan, pelatihan, dan kebijakan pemberdayaan UMKM yang lebih tepat sasaran, khususnya pada aspek peningkatan literasi keuangan dan pemanfaatan layanan keuangan formal. Temuan penelitian juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi area kelemahan yang masih dominan pada pelaku UMKM sehingga intervensi yang dilakukan dapat lebih efektif. Bagi lembaga keuangan dan penyedia layanan keuangan digital, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk memperluas layanan yang lebih inklusif sekaligus meningkatkan edukasi penggunaan produk keuangan agar akses yang sudah terbuka dapat benar-benar diikuti pemahaman dan pemanfaatan yang optimal. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan berkontribusi dalam mendukung penguatan UMKM yang lebih tangguh, tertib secara finansial, dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pengelolaan keuangan UMKM di Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap.